

# Kekuatan Jempol Gen-Z: Peran Media Sosial dalam Mendorong Proses Digital terhadap Kebijakan DPR

Annisa Ramadhani<sup>1</sup>, Sabrina Nur Aisyah<sup>2</sup>, Shuhufa Nur Indah Auliya<sup>3</sup>

Program studi Sastra Inggris, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 250302110039@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Digital; Gen-Z; Demokrasi;  
Media Sosial; Politik

## Keywords:

Digital; Gen-Z; Democracy;  
Social Media; Politik

## ABSTRAK

Gen-Z merupakan generasi penting dalam mencapai visi "Indonesia Emas" 2045. Meskipun sering dianggap tidak peduli politik, mereka sebenarnya aktif mendorong perubahan budaya politik lewat media sosial. Sebagai "digital native", Gen-Z memanfaatkan platform seperti TikTok, Instagram, dan X untuk membagikan informasi, menyuarakan pendapat, serta memperjuangkan masalah sosial dan politik, termasuk hak asasi manusia serta keadilan sosial. Masalah utama dalam penelitian deskriptif kualitatif ini adalah bagaimana peran media sosial yang didorong oleh Gen-Z secara efektif mendorong protes digital dan memengaruhi proses kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta

tantangan yang dihadapinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial telah bertransformasi menjadi mekanisme pengawasan dan akuntabilitas publik yang kuat dan menjadikan Gen-Z sebagai motor penggerak utama digitalisasi politik. Partisipasi mereka terbukti memengaruhi DPR, contohnya dalam kampanye #TolakRUUOmnibusLaw pada tahun 2020 yang memaksa DPR merevisi pasal kontroversial, serta pengawasan ketat terhadap RUU Perampasan Aset dan RUU KUHP yang bahkan memaksa pimpinan DPR memberikan respons langsung selama Rapat Paripurna. Keunikan studi ini ada pada analisis konten yang menunjukkan perubahan media sosial dari alat komunikasi menjadi sistem pengawasan publik yang kuat, dipimpin oleh Gen-Z. Namun, tantangan seperti penyebaran hoaks dan disinformasi, serta ketergantungan berlebihan pada teknologi, masih ada. Hal ini memerlukan peningkatan literasi digital dan pendidikan moral.

## ABSTRACT

Gen Z is an essential generation in achieving the "Indonesia Emas" 2045 vision. Although often perceived as politically indifferent, they are actually active in driving changes in political culture through social media. As digital natives, Gen Z uses platforms such as TikTok, Instagram, and X to share information, voice opinions, and advocate for social and political issues, including human rights and social justice. The main problem addressed in this qualitative descriptive research is how the role of social media, driven by Gen Z, effectively encourages digital protests and influences the policymaking process of the House of Representatives (DPR), as well as the challenges it faces. The study concludes that social media has transformed into a powerful mechanism for public oversight and accountability, positioning Gen Z as a key driver of political digitalization. Their participation has been shown to influence the DPR, such as during the #TolakRUUOmnibusLaw campaign in 2020, which pushed the DPR to revise controversial articles, as well as in their close monitoring of the Asset Confiscation Bill and the Criminal Procedure Code Bill, which even compelled DPR leaders to respond directly during a Plenary Session. The uniqueness of this study lies in its content analysis, which shows the shift of social media from a communication tool to a strong system of public oversight, led by Gen Z. However, challenges such as the spread of hoaxes and disinformation, as well as excessive dependence on technology, remain. This situation calls for improved digital literacy and moral education.



## Pendahuluan

Gen-Z merupakan generasi yang penting untuk mewujudkan “Indonesia Emas” 2045. Gen-Z sering dipandang apatis dan kurang terlibat dalam dunia politik. Namun faktanya, Gen-Z sering terlibat dalam perubahan budaya politik melalui media sosial. Mereka pandai memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi, menyuarakan pendapat dan ikut andil dalam memperjuangkan HAM. Gen-Z lahir di era pesatnya perkembangan teknologi untuk memberikan kekuatan baru yang bisa menarik atensi. Keberanian Gen-Z dalam menyuarakan pendapat patut di acungi jempol karena tidak semua orang bisa seberani mereka. Partisipasi Gen-Z sangat dibutuhkan untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat sekitar terkait pentingnya penggunaan teknologi dan media sosial dalam lingkup politik. Namun, peran Gen-Z tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya campur tangan dari gen sebelumnya, yaitu Gen Milenial (Deandra Rafiq Daffa et al., 2024).

Berkembangnya media massa juga mempengaruhi masyarakat sekitar. Media massa ini dapat memberikan pengaruh yang positif untuk khalayak sekitar. Selain itu, media massa juga menyediakan banyak informasi yang dapat dengan mudah di akses oleh siapapun kapan saja dan dimana saja. Terutama para Gen-Z yang sering mengakses media sosial (Mulyadi et al., 2025). Namun, ada beberapa tantangan bagi Gen-Z terkait media massa ini. Banyak Gen-Z yang masih menganggap dunia politik ini negatif, seperti menganggap dunia politik adalah sebuah pertarungan yang banyak mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum (Mulyadi et al., 2025).

## Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini fokus pada analisis mendalam berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik "Kekuatan Jempol Gen-Z: Peran Media Sosial dalam Mendorong Protes Digital terhadap Kebijakan DPR". Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara dalam melalui analisis data deskriptif, seperti kata-kata dan teks (Creswell & Poth, 2018). Sementara itu, studi dokumen adalah cara mengumpulkan data dengan memeriksa dokumen sebagai sumber utama informasi. Ini membantu memberikan konteks dan pemahaman yang mendalam tentang masalah sosial, seperti protes digital oleh Gen-Z di Indonesia (Bowen, 2009). Sumber data utama adalah data sekunder yang diambil dari berbagai literatur, seperti artikel, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan sumber serupa. Semua sumber data dipilih dari tahun publikasi dalam 10 tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan mencerminkan kondisi terkini interaksi Gen-Z dengan media sosial serta protes terhadap kebijakan DPR. Data-data ini diproses melalui analisis isi, yaitu cara untuk menemukan pola, tantangan, dan peluang khusus dari literatur, seperti bagaimana platform digital memengaruhi partisipasi politik generasi muda.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengenali bagaimana media sosial menjadi alat kuat bagi Gen-Z dalam mengatur protes digital. Hal ini juga dapat membantu Gen-Z mengatasi beberapa hambatan seperti informasi palsu, serta memanfaatkan kesempatan untuk terlibat aktif dalam demokrasi modern. Dengan

menggunakan metode penelitian ini, akan mengetahui bagaimana dinamika sosial-politik terkini di Indonesia, memberikan pandangan praktis bagi pihak terkait untuk mendorong partisipasi digital yang positif.

## Pembahasan

Gen-Z sudah lahir di era digital, banyak dari mereka yang sering memberikan kritik terhadap kebijakan DPR melalui medsos seperti twitter (X), TikTok, atau Instagram. Kritik tersebut biasanya berisi pesan yang singkat, emosional. Jumlah pengguna aktif diperkirakan mencapai sekitar 5,07 miliar secara global atau sekitar 63% dari populasi dunia dengan total populasi dunia secara global, atau sekitar 63% dari populasi dunia ± 8 miliar (meningkat dari 4,95 miliar pada 2024). Dan peningkatan akses internet di dominasi oleh Gen-Z dan Alpha. Waktu penggunaan harian rata-rata menghabiskan 2 jam 27 menit per hari di media sosial, naik dari 2 jam 24 menit pada 2024.

**Tabel 1.** Platform terpopuler 2024 :

<b>Aplikasi</b>	<b>Pengguna</b>
TikTok	1,8 Miliar pengguna aktif bulanan
Instagram	2 Miliar pengguna
Facebook	3 Miliar pengguna
YouTube	2,5 Miliar pengguna
WhatsApp	2 Miliar pengguna

*Sumber: Datareportal's Digital 2024*

Lebih dari 50% penggunanya berusia 18-34 tahun dengan peningkatan yang signifikan di Asia dan Afrika.

**Tabel 2.** Platform terpopuler 2025 :

Aplikasi	Pengguna
TikTok	120-130 juta pengguna
Instagram	100 juta pengguna
Facebook	140 juta pengguna
YouTube	110 juta pengguna
WhatsApp	150 juta pengguna

Sumber: Datareportal's Digital 2024

Demografi dan Tren : 70% pengguna berusia 18-34 tahun. Pengguna meningkat untuk e-commerce, politik (seperti pemilu 2024), dan hiburan. Namun, dampak seperti hoaks dan privasi data tetap ada (Suryawijaya et al., 2025). Dari tabel yang sudah dibandingkan, penggunaan media sosial di zaman sekarang mustahil untuk dihindari. Survey menunjukkan bahwa sekitar 85% orang ternyata sering memakai media sosial, paling minimal adalah sekali dalam seminggu untuk mengikuti isu-isu politik. Nah, platform seperti TikTok dan Instagram kebanyakan membahas kebijakan DPR seperti RUU Kesehatan yang biasanya mendapatkan respons lumayan tinggi, rata-rata 10.000 likes dan 5.000 shares. Ini membuktikan bahwa orang semakin aktif berdiskusi tentang politik lewat media sosial.

### **Dampak terhadap Proses Kebijakan DPR**

Teknologi dan internet seperti media sosial sudah menjadi alat untuk masyarakat ikut serta dalam pembentukan kebijakan pemerintahan. Media sosial dipilih karena dianggap lebih sederhana dan bisa mempermudah bagi siapa saja yang ingin mengaksesnya. Selain itu, proses demokrasi, terutama di media sosial sudah berjalan dengan lancar. Namun, perhatian dari aparat birokrasi untuk memahami partisipasi politik melalui media sosial masih minim. Lalu, data terkait kebijakan pemerintahan juga memiliki peran yang krusial di bidang politik, ekonomi dan sosial. Data tersebut semakin penting dalam merumuskan kebijakan publik dan harus bisa mengakomodasi partisipasi masyarakat (Latifah et al., n.d.). Media sosial telah menjadi salah satu pendorong bagi Gen-Z untuk membuat DPR lebih terbuka. Misalnya, #TolakRUUOmnibusLaw pada 2020 yang sudah berhasil mempengaruhi revisi undang-undang. Akibatnya DPR terpaksa menunda dan merevisi beberapa pasal kontroversial, seperti yang berkaitan dengan tenaga kerja dan lingkungan, untuk menghindari eskalasi protes massal. Berdasarkan analisis dari DataReportal (2010), kampanye ini menghasilkan setidaknya lebih dari 5 juta respon di TikTok dan Instagram dengan hastag #TolakRUUOmnibuslaw mencapai trending global. Sedangkan laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (2020) telah mencatat bahwasanya kampanye ini telah meningkatkan kesadaran

masyarakat dan public sebesar 40% dan survey dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa sebesar 65% responden muda telah mengaku bahwa sudah terpengaruh oleh konten di media sosial dalam mendukung revisi UU tersebut. Gen-z juga sering mengkritik DPR melalui konten viral di TikTok seperti video parodi tentang deforestasi yang menyebabkan polusi udara. Dengan hastag #DPRGagalLindungiBumi yang mencapai 50.000 views, meyoroti kebijakan DPR yang lemah dalam UU Kehutanan.

Seharusnya dewan perwakilan rakyat menjadi cerminan untuk rakyat, ruang untuk berkeluh kesah dan harapan rakyat agar dapat didengar. Akan tetapi realitanya sangat jauh berbeda (Lutfi & Pd, 2025). Seperti beberapa video yang saya lampirkan diatas itu bukan lagi ungkapan yang dapat dijadikan sebagai hal yang wajar melainkan keluhan rakyat yang selama ini di bungkam. Video tersebut menjadi salah satu bukti untuk menguatkan bahwasannya peran gen Z dalam media sosial di era digital saat ini sangat penting dalam dunia politik. Di negara yang katanya menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat, malah yang terjadi yaitu sebaliknya, para wakil rakyat yang dipilih dengan suara dan harapan para rakyat yang ingin mendapatkan keadilan justru menutup mata dan telinga rapat rapat ketika mereka semua sudah terpilih dan mendapatkan apa yang mereka mau. Peristiwa ini merupakan bentuk krisis keadilan yang semakin parah, sebuah pengkhianatan terhadap rakyat-rakyat kecil yang tidak bisa bergerak karena mereka merasa tidak dapat bisa melakukan apa apa selain merintah dalam diam yang saat ini perlahan dibongkar oleh generasi Z yang merasa bukan waktunya lagi untuk diam dan terus berlutut di bawah para wakil rakyat tersebut.

Seharusnya dewan perwakilan rakyat menjadi cerminan untuk rakyat, ruang untuk berkeluh kesah dan harapan rakyat agar dapat didengar. Akan tetapi realitanya sangat jauh berbeda. Ketika rakyat-rakyat kecil, pekerja biasa menjerit meminta keadilan terhadap apa yang terjadi pada mereka seperti harga harga bahan pokok tiba tiba naik drastic dan kurangnya lapangan pekerjaan bagi rakyat yang hanya menyelesaikan Pendidikan sampai SMA. Hal ini menunjukkan Keterlibatan aktif generasi z ini sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat sekitar bahwa pentingnya penggunaan media sosial dalam politik

Salah satu contoh peran nyata generasi z pada berita atau isu mengenai DPR dapat menjadi viral di TikTok karena platform tersebut sangat sefrekuensi dengan karakteristik komunikasi Gen-Z yang digital native. Gen-Z, yang lahir di era digital, mahir memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi, menyuarakan pendapat, dan memperjuangkan serta mempertahankan hak asasi. Keberanian mereka dalam menyuarakan pendapat patut diacungi jempol karena tidak semua orang bisa mempunyai keberanian sebesar generasi z dalam membela negara yang tidak pernah maju karena ulah oknum. dan media sosial menjadi wadah untuk mengekspresikan keberanian dan menyuarakan isu isu penting tersebut yang merupakan kunci keberhasilan peran Gen-Z dalam menyebarkan informasi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sekitar 85% orang sering menggunakan media sosial, setidaknya sekali seminggu, untuk mengikuti isu-isu politik. Mereka juga merasa konten politik di media sosial cenderung lebih mudah dipahami Karena peran generasi Z sangat berpengaruh dalam kontroversi RUU Kesehatan yang mendapatkan respons tinggi dari pengguna tiktok, menyebar dengan cepat dan luas.

Seperti video yang bisa kita lihat diatas kesenjangan antara rakyat dan para wakil dpr terlihat sangat menonjol ketika para dewan perwakilan rakyat memiliki gaya hidup mewah yang bertolak belakang dengan kesulitan rakyat, saya sebagai generasi z seringkali tidak terima dan ingin sekali menyuarakan suara hati rakyat rakyat yang ditindas terus menerus dan juga ketika melihat kesenjangan yang sangat jauh dimana rakyat kecil memiliki tempat tinggal yang sangat tidak layak, tidur dengan alas seadanya, tidak mempunyai tempat tinggal bahkan untuk mereka makan saja mereka kesulitan sedangkan dilain sisi para wakil dpr bersenang senang dengan hak yang seharusnya bukan milik mereka dan seolah olah tidak melihat bahwa rakyat sudah hampir sengsara karena tidak adanya tanggung jawab terhadap janji janji sebelum mereka dipilih oleh rakyat. Mana janji yang akan menyuarakan suara rakyat mana yang katanya ingin menjadi garda terdepan untuk rakyat semuanya tidak ada bukti nyata. Bahkan ketika adanya peristiwa banjir yang terjadi di aceh, sumatera dan sekitarnya yang turun tangan lebih dulu untuk mengulurkan bantuan di dominasi oleh sesama rakyat. kemana para pejabat yang berkuasa itu mana empati dan hati nurani mereka. Salah satu contoh yang bisa kita lihat peristiwa demo yang terjadi kemarin berakhir mengenaskan seorang ojol yang hanya mencari nafkah berujung menjadi korban karena ulah oknum yang bukannya membela rakyat kecil tetapi malah asal main kekerasan tanpa pandang bulu. Alasan yang mereka sampaikan karena tuntutan pekerjaan mereka hanya menjalankan tugas dari atasan, tetapi jika mereka mempunyai empati mereka bisa menjalankan tugas dari atasan tanpa adanya campur tangan kekerasan. Mereka boleh saja melindungi para wakil dewan tersebut dengan alasan kedudukan mereka lebih tinggi akan tetapi bukan kekerasan menjadi solusi demo tersebut akan selesai. Dengan adanya hal seperti itu membuat para rakyat semakin tidak memiliki rasa respect lagi bahkan dengan kejadiannya peristiwa tersebut rakyat rakyat jadi semakin berani maju untuk mendapatkan hak yang seharusnya.

Keterlibatan Gen-Z di media sosial telah meluas, mulai dari topik populer hingga pengawasan kebijakan yang rumit, sehingga platform digital jadi tempat utama untuk mempertanggungjawabkan kebijakan kebijakan DPR. Misalnya, perhatian Gen-Z pada RUU Perampasan Aset menunjukkan bagaimana mereka memakai media sosial untuk mengkritik lambatnya pengesahan undang-undang penting dan meminta penjelasan dari DPR tentang dugaan hambatan politik serta membandingkan urgensinya dengan aturan hukum internasional. Selain itu, isu RUU KUHAP memperlihatkan pengawasan digital yang kuat. Acara resmi seperti pengesahan di Rapat Paripurna sering jadi konten viral di YouTube Shorts, yang mengkritik bagian "problematic" dari undang-undang tersebut dan mendorong masyarakat untuk terus mengawasi. Puncaknya terjadi ketika siaran langsung Rapat Paripurna, di mana Ketua Komisi III DPR RI sengaja meluangkan waktu untuk membantah dan menjelaskan berita berita palsu yang menyebar luas di media sosial tentang pasal kontroversial RUU KUHAP, seperti soal penyadapan dan penyitaan tanpa izin hakim. Hal ini membuktikan bahwa DPR harus selalu menanggapi disinformasi dari ruang digital, dan media sosial telah menjadi alat pengawas yang efektif, dengan Gen-Z sebagai pendorong utama yang menuntut transparansi serta akuntabilitas dari lembaga legislatif.

### **Tantangan yang Dihadapi**

Meskipun media sosial berhasil memberikan dampak yang positif, namun ada beberapa tantangannya juga. Banyak informasi yang bertebaran yang belum tentu kebenarannya. Dan menimbulkan berbagai perspektif seperti hoax atau disinformasi. Kesempatan ini akan disebarluaskan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang pada akhirnya menimbulkan persepsi yang dangkal. Ini juga berkaitan dengan kurangnya kebiasaan menyaring informasi dan literasi (Indira Nazwa Fazrina et al., 2025). Selanjutnya adalah ketergantungan informasi. Jika seseorang selalu mengandalkan teknologi secara berlebihan, ini akan berdampak pada kemampuan mereka untuk berinteraksi secara langsung, sulit untuk mengatur emosi mereka. (Daffa et al., n.d.), dan ketika ada informasi atau isu yang sedang viral dan belum tentu kebenarannya, dengan emosi yang tidak sabit ini bisa menimbulkan suatu konflik dan memecah belah antarpihak.

Gen-z juga cenderung mengikuti temannya dan susah untuk membuat keputusan sendiri. Ini dikarenakan aspek psikologi seperti kemampuan, keterikatan, dan otonomi yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, mereka harus bisa menahan diri untuk tidak FOMO (Fear Of Missing Out), karena fomo sendiri muncul ketika seseorang merasa tidak bisa memenuhi kebutuhan psikologis yang bisa memunculkan kecemasan dan kekhawatiran. Sehingga alasan ini membuat Gen-z selalu aktif di media sosial agar tidak ketinggalan informasi yang sedang panas diperbincangkan (Agata Fanny Pakpahan et al., 2024). Jika ini terus berlanjut, gen-z akan kehilangan jati diri mereka dan susah untuk menentukan pilihan mereka sendiri terutama di bidang politik. Untuk mengatasi tantangan tersebut, gen-z perlu edukasi yang bisa mengedepankan rasa persatuan, toleransi dan pendidikan moral. Selain itu fomo juga harus digunakan untuk hal yang positif dengan cara menyaring informasi terlebih dahulu. Jika informasi tersebut valid dan memang membutuhkan suara yang banyak untuk disebarluaskan, maka fomo boleh dilakukan. Dengan begitu, tidak akan ada perpecahan satu sama lain (Deandra Rafiq Daffa et al., 2024)

### **Peran Gen-Z sebagai Agen Perubahan**

Media sosial telah menjadi tempat utama untuk kegiatan politik bagi Generasi Z. Gen-Z, yang sering disebut sebagai "Digital Native" sering kali bergantung pada platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube untuk mencari dan membahas informasi politik dengan cepat (Kurniawan, n.d.). Peran penting media sosial ini terlihat jelas dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, di mana survei menunjukkan bahwa sekitar 85% orang sering menggunakannya, setidaknya sekali seminggu, untuk mengikuti isu-isu politik. Dengan akses yang mudah dan penyebaran pesan yang cepat, media sosial berfungsi sebagai media alternatif yang efektif untuk membangun jaringan komunikasi politik (Susanto, n.d.).

Keterlibatan Gen-Z di media sosial memiliki dampak nyata dalam memengaruhi proses dan kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga membuat institusi tersebut lebih terbuka. Contoh nyata dari kekuatan ini adalah kampanye #TolakRUU Omnibus Law (bukti video) pada tahun 2020, yang berhasil memengaruhi perubahan undang-undang. Kampanye ini mendapat lebih dari 5 juta respons di TikTok dan Instagram, bahkan

menjadi tren global. Selain itu, isu-isu kebijakan DPR lainnya seperti RUU Kesehatan juga mendapat respons tinggi, dengan rata-rata 10.000 likes dan 5.000 shares, yang menunjukkan bahwa orang semakin aktif membahas politik melalui media sosial. Hal ini membuktikan bahwa Gen-Z menggunakan platform digital untuk mengumpulkan opini dan mendorong pertanggungjawaban DPR, sehingga menjadi alat kuat untuk tindakan bersama.

Keberhasilan Gen-Z dalam memanfaatkan media sosial sebagai pendukung komunikasi politik terletak pada kemampuannya dalam menyebarkan informasi yang singkat dan menarik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri telah mengadopsi strategi komunikasi digital dengan membuat konten berupa video pendek dan infografis yang disebar melalui media sosial, sesuai dengan preferensi Gen-Z yang ingin informasi dalam format ringkas dan padat (Kurniawan, n.d.). Meskipun ada potensi dampak negatif seperti berita palsu dan masalah privasi data, media sosial telah menjadi wujud nyata untuk Gen-Z dalam menggunakan hak politiknya (Susanto, n.d.). Dengan populasi pemilih muda yang menjadi pemegang hak pilih terbanyak, media sosial menjadi alat penting bagi Gen-Z untuk memastikan partisipasi aktif dalam sistem demokrasi (Rahayu & Suhita, 2025).

Media sosial telah menjadi sasaran ruang utama bagi Generasi Z untuk memenuhi kebutuhan informasi politik dan membentuk opini mereka. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang mungkin bergantung pada media tradisional, bagi Gen Z, platform digital seperti TikTok, Instagram, dan YouTube adalah satu-satunya tempat utama untuk mengakses berita politik yang sedang dibicarakan, berdiskusi tentang isu sosial, dan terlibat dalam kampanye global. Peneliti yang sama juga mengatakan bahwa mayoritas Gen Z (81,4%) setuju bahwa konten politik di media sosial cenderung lebih mudah dipahami. Selain itu, media sosial mendukung demokrasi pengetahuan dan informasi, mengubah peran Generasi Z dari hanya sebagai pengguna pasif menjadi lebih terlibat aktif. Hal ini memungkinkan mereka untuk memiliki pandangan politik yang lebih luas, bahkan dapat menjadi pengaruh besar untuk hasil pemilihan, yang terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan (Fau & Kunci, n.d.).

Platform media sosial memberikan peluang bagi Gen Z untuk berpartisipasi dalam politik secara kreatif dan inovatif. Mereka memanfaatkan fitur-fitur unik media baru seperti video pendek, infografis, dan podcast untuk menyebarkan pesan politik yang kompleks dengan cara yang jauh lebih mudah dicerna dan menarik (Kurniawan, n.d.). Konten yang kaya visual ini menyebar dengan cepat dan luas, bahkan menjangkau daerah yang sulit dijangkau kampanye konvensional, termasuk Gen Z di pedesaan (Kurniawan, n.d.). Kemampuan media sosial untuk menciptakan ruang dialog antara politisi dengan masyarakat juga menjadi daya tarik kuat, meningkatkan minat pemilih pemula untuk lebih mendalami dan berpartisipasi dalam proses politik.

Lebih dari sekadar sumber informasi dan kreativitas, media sosial juga berfungsi sebagai alat pendorong dan penguatan partisipasi politik praktis di kalangan Gen Z. Di era digital, media sosial menjadi sarana strategis bagi lembaga politik untuk mensosialisasikan informasi pemilu dan program kerja secara tepat (Kurniawan, n.d.). Bagi Gen Z, platform ini menjadi awal mula kemajuan politik untuk terlibat langsung dalam proses politik hingga menggerakkan dukungan melalui aktivisme digital (Fau &

Kunci, n.d.). Aktivisme digital memungkinkan Gen Z melewati batas-batas ruang formal dan birokrasi, di mana media sosial menjadi ruang mengekspresikan politik dan mobilisasi kolektif (Indira Nazwa Fazrina et al., 2025). Dengan ini, Gen Z memanfaatkan media sosial untuk merubah pandangan publik bahwa dengan adanya generasi mereka generasi yang aktif, kritis, dan memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah politik (Kurniawan, n.d.).

## Kesimpulan dan Saran

Gen-Z memainkan peran penting dalam mewujudkan visi "Indonesia Emas" 2045 melalui keterlibatan aktif mereka di media sosial, yang secara efektif telah membantah stigma bahwa mereka apatis terhadap dunia politik. Gen-Z yang lahir dan tumbuh di era teknologi digital yang maju telah membuat mereka sangat mahir menggunakan platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan Twitter (X) untuk berbagai tujuan. Mereka tidak hanya menyebarkan informasi terkini, tetapi juga menyuarakan kritik-kritik terhadap kebijakan pemerintah, serta memperjuangkan isu-isu sosial-politik, termasuk hak asasi manusia dan keadilan sosial. Hal ini tidak hanya dapat menarik perhatian publik, tetapi juga mendorong tuntutan akuntabilitas yang kuat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dukungan dari generasi sebelumnya, seperti generasi milenial, juga turut memperkuat partisipasi ini dan menciptakan kolaborasi antargenerasi yang harmonis.

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi alat utama bagi Gen-Z untuk mendorong proses digitalisasi politik dan secara langsung memengaruhi kebijakan DPR. Gen-Z memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengubah pesan politik yang kompleks dan rumit menjadi konten yang singkat, emosional, dan mudah dipahami oleh khalayak luas, sehingga menjadikan partisipasi politik yang dapat diakses publik. Salah satu contoh nyata adalah kampanye #TolakRUUOmnibusLaw pada tahun 2020, yang berhasil memobilisasi jutaan respons online dari masyarakat, terutama para pemuda Indonesia. Kampanye ini memaksa DPR untuk merevisi beberapa pasal kontroversial dalam undang-undang tersebut, menunjukkan bagaimana suara digital dapat mengubah arah kebijakan. Selain itu, isu-isu lainnya seperti RUU Perampasan Aset dan RUU KUHP juga mendapat pengawasan yang ketat melalui konten-konten viral yang menyebar cepat di platform digital. Bahkan, hal ini memaksa pimpinan DPR untuk merespons berita-berita palsu secara langsung selama rapat paripurna, yang menegaskan bahwa media sosial telah bertransformasi menjadi alat pengawasan yang efektif. Dengan demikian, Gen-Z berperan sebagai motor penggerak utama dalam menuntut transparansi dan akuntabilitas dari lembaga legislatif dan membuktikan bahwa partisipasi digital dapat membawa perubahan yang nyata.

Meskipun Gen-Z aktif dalam menuntut transparansi, realitas politik kontemporer sering menunjukkan ketimpangan antara "suara rakyat" dan "suara elit". Aspirasi rakyat kerap terpinggirkan oleh kepentingan segelintir elit politik yang menguasai kekuasaan, sumber daya, dan kebijakan publik, yang dipandang sebagai suatu paradoks dalam demokrasi konstitusional. Dalam konteks ini, aktivisme digital Gen-Z menjadi sangat penting. Peran Gen-Z dalam mendesak akuntabilitas ini sejalan dengan pandangan bahwa: Dengan kata lain, Gen-Z adalah manifestasi dari "keberanian rakyat" yang

menggunakan media sosial sebagai alat koreksi. Tugas rakyat adalah memastikan elit yang berkuasa tidak lupa siapa yang memberi mandat. Fenomena dominasi elit, meskipun tidak secara eksplisit diperintahkan oleh konstitusi, lahir dari cara kita menafsirkan dan menjalankan UUD 1945. Oleh karena itu, partisipasi digital Gen-Z menjadi sangat krusial sebagai penyeimbang kekuatan dan untuk memastikan kedaulatan rakyat benar-benar terwujud, bukan hanya sebatas atas nama rakyat.

## Daftar Pustaka

- Agata Fanny Pakpahan, Dadi Mulyadi Nugraha, Hanifah El Faizah, Levina Lidya Maheswari, Muhtarom Nur Rasyid, Shabrina Zainuba Azahra, & Yesa Rismawati. (2024). Pengaruh FoMO (Fear of Missing Out) dalam Perspektif Gen Z terhadap Pesta Demokrasi 2024. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 2(1), 168–174. <https://doi.org/10.51903/pendekar.v2i1.587>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W. ., & Poth, C. N. . (2018). *Qualitative inquiry and research design*. SAGE.
- Deandra Rafiq Daffa, Dave Arthuro, Jovanes Agus Fernanda, & Muh. Bintang Widya Pratama. (2024). Gen-Z: Eksplorasi Identitas Budaya dan Tantangan Sosial Dalam Era Digital. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 169–183. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v2i2.3112>
- Fau, P. K., & Kunci, K. (n.d.). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Gen Z Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Studi Kasus Pemilih Generasi Z Di Universitas Kristen Indonesia)*.
- Indira Nazwa Fazrina, Desy Safitri, & Sujarwo Sujarwo. (2025). Persepsi Generasi Z terhadap Efektivitas Aktivisme Digital sebagai Bentuk Partisipasi Sosial. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(3), 53–62. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i3.746>
- Kurniawan, F. (n.d.). *jphmanager,+5.+OK+Fajar+Kurniawan*.
- Latifah, K. N., Fatma, &, & Najicha, U. (n.d.). IMPLIKASI MEDIA SOSIAL TERHADAP FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).
- Lutfi, M., & Pd, S. (2025). “Antara Ancaman Atau Keniscayaan.”
- Mulyadi, D., Kedzma Alvian, C., Lananda, A., Farraz, M. I., Simbolon, C. C., & Perdana, Z. A. (2025). PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP GENERASI Z SEBAGAI UPAYA UNTUK MENDORONG PARTISIPASI AKTIF DALAM PEMILU PRESIDEN DAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI TINJAU DARI TEORI DEMOKRASI. *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(1).
- Rahayu, V. D., & Suhita, D. (2025). PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SURAKARTA DALAM MENINGKATKAN JUMLAH PEMILIH MUDA PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024. *Solidaritas*, 9(1). <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/12253>

Suryawijaya, T., Fauzy, M. R. N., & Maulidina, N. F. (2025). Peran Media Sosial dalam Membentuk Partisipasi Politik Gen Z Pada Pemilu 2024. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 15(2), 125–147. <https://doi.org/10.22212/jp.v15i2.4441>

Susanto, E. H. (n.d.). MEDIA SOSIAL SEBAGAI PENDUKUNG JARINGAN KOMUNIKASI POLITIK.